

AL-HURRIYAH

JURNAL HUKUM ISLAM

MENDAMAIKAN KEBERAGAMAN MELALUI PENGUATAN
TOLERANSI DAN KERUKUNAN ANTAR KOMUNITAS MULTI AGAMA
A. Rahman Ritonga

KEWARISAN DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN
(Mengungkap Filosofi Porsi Bagian Laki-laki dan Perempuan 2:1)
Arsal

METODOLOGI PEMIKIRAN HUKUM SYIAH IMAMIYAH
DAN PENERAPANNYA DALAM FIQH
(Kajian terhadap Kitab *al-Mabsuth fi Fiqh Imamiyah*
Karya al-Thusi)
Busyro

AKIBAT OVERMIGHT (KEADAAN MEMAKSA)
DALAM PERJANJIAN TIMBAL BALIK
Elfiani

PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
(Ditinjau dari Perspektif Yuridis dan Sosiologis)
Fajrul Wadi

KRITIK PLURALISME DALAM MASYARAKAT MAJEMUK
ANTARA PEMIKIR DAN MUFASSIR
Helfi

PENETAPAN AWAL RAMADHAN, AWAL SYAWAL DAN 10 ZULHIJAH
Zul Efendi



Diterbitkan Oleh :

Pusal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M)
STAIN SJECH M. DJAMIL DJAMBEK
Bukittinggi

KEWARISAN DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN (MENGUNGKAP FILOSOFI PORSI BAGIAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN 2:1)

Arsal*

Abstract: *Regulation of inheritance in the Quran, especially parts that are not the same between men and women make the debate among scholars that ultimately lead to the opinion that the inheritance in the Quran nuanced muthlak justice as it is applied, and the other opinion says impression that there was discrimination provisions that can be adapted to the changed dynamics of the community. This phenomenon needs to be responded by reviewing and understanding how the philosophical portion of the parts in the verses of the Koran.*

Keywords: *Heritage, al-Quran*

PENDAHULUAN

Al-Quran dalam ajaran Islam merupakan kitab suci yang berisi kumpulan firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw sebagai kitab *samawi*. Proses turunnya berlangsung secara berangsur-angsur (*munajjaman*) yang umumnya dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang muncul, kemudian dihimpun menjadi sebuah kitab suci untuk dijadikan bukti, sebagai petunjuk bagi para ilmunan, peringatan bagi orang-orang yang ingkar serta pedoman bagi orang yang lalai dan melampaui batas.¹

Sebagai kitab *samawi* yang berdimensi universal, abadi dan berwawasan luas, orientasi al-Quran memberikan bimbingan dan petunjuk bagi tatanan hidup dan kehidupan manusia dalam rangka mewujudkan kehidupan yang berbudaya dan bermartabat. Hal ini sangat erat sekali dengan situasi dan kondisi bangsa Arab sebelum diturunkannya al-Quran yang disebut dengan jahiliyah, yaitu suatu tatanan hidup masyarakat yang hampa budaya.

* Staf pengajar STAIN Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi

Salah satu problem yang sangat krusial mendapat perhatian dan bimbingan al-Quran adalah masalah keluarga dan waris. Mengutip pendapatnya Abdul Wahab Khalaf yang menyebutkan dalam kitabnya tentang jumlah ayat-ayat hukum yang berjumlah 368 ayat hukum dengan pembahasan 140 ayat hukum menginformasikan tentang ibadah dan 228 ayat hukum menginformasikan tentang kehidupan dunia yang didominasi oleh ayat-ayat tentang ekonomi dan hukum kekeluargaan (al-ahwal al-syakhshiyah) yang inklud di dalamnya hukum kewarisan, yakni masing-masing sebanyak 70 ayat hukum.²

Hukum kewarisan sangat erat hubungannya dengan pemindahan hak milik berupa harta benda yang ditinggalkan (*tirkah*) oleh seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang hidup yang ditinggalkannya (ahli waris). Pada masa Arab pra-Islam masyarakat telah menerapkan sistem kewarisan bagi yang meninggal dunia terhadap kerabatnya. Namun dalam sistem kewarisan itu mereka cenderung menerapkannya secara diskriminatif, mereka masih berorientasi kepada power dan peran seseorang mendatangkan materi. Muhammad Ali Ash-Shabuni menuliskan bagaimana bentuk diskriminasi itu, yakni mereka tidak memberikan hak waris kepada wanita dan anak-anak dengan alasan mereka tidak mampu berperang untuk mempertahankan diri, suku dan kelompoknya.³

Kehadiran Islam dengan sumber ajarannya al-Quran dan sunnah telah membuat formulasi baru terkait dengan regulasi hukum kewarisan yang tentu saja menampilkan sisi keadilan dan persamaan hak. Namun akhir-akhir ini muncul pemikiran dan gagasan yang mengkritisi bahwa kewarisan dalam al-Quran tidak mencerminkan keadilan dan terkesan diskriminasi atau bias gender. Salah satu unsur pokok yang disorot adalah bahagian yang tidak sama antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian sistem kewarisan dalam al-Quran perlu diamandemen, karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat modern.

Perlu diyakini bahwa identitas hukum Islam yang bersumberkan al-Quran dan sunnah akan mengantarkan umatnya kepada keadilan, mashlahah, dan rahmat, serta sarat dengan beragam hikmah bagi kehidupan.⁴ Dalam konteks regulasi kewarisan dalam al-Quran, Allah memaparkannya begitu rinci/detail yang terkait ahli waris dan porsi masing-masingnya yang tentu saja tidak terlepas dari nuansa keadilan, mashlahah dan rahmat.

Makalah singkat ini akan membahas bagaimana filosofis pengaturan hukum kewarisan menurut ayat-ayat al-Quran, baik berkenaan dengan prinsip

yang dibangun, ahli waris yang berhak mendapatkan (*ashshabul furudh*) harta warisan, maupun yang berkenaan dengan porsi pembahagian (nasib) masing-masing ahli waris.

PEMBAHASAN

Prinsip Umum Kewarisan Menurut al-Quran

Maksud prinsip umum dalam pembahasan ini adalah beberapa ketentuan mendasar yang sangat perlu dibangun dan diwujudkan ketika mengimplementasikan hukum kewarisan. Prinsip ini merupakan modifikasi kewarisan Islam yang sebelumnya cenderung diabaikan dan dilupakan sama sekali, sehingga tidak tercipta rasa keadilan dan kebersamaan. Di antara prinsip umum yang dijelaskan dalam al-Quran berkenaan dengan ketentuan kewarisan adalah sebagai berikut:

Pertama, prinsip bilateral⁵ yaitu suatu ketentuan dalam kewarisan bahwa persoalan gender harus ditiadakan, sebab hal ini tidak mendukung semangat keadilan. Ketentuan ini bentuk penegakkan panji keadilan, yang mana Islam tidak membedakan gender (jenis kelamin) dalam hal mendapatkan harta peninggalan atau harta pusaka. Hal ini sebagaimana tertuang dalam firman Allah yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

*Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.*⁶

Ayat di atas turun dilatar belakangi oleh kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah dahulu yang tidak memberikan warisan kepada wanita dan anak-anak yang masih dibawah umur. Sedangkan harta warisan atau pusaka itu diperuntukkan bagi laki-laki yang dewasa. Sehubungan dengan peristiwa itu Allah menurunkan ayat ke-7 dari surat an-Nisa'.⁷

Berdasarkan zahir nash, ada ulama yang memahami maksud laki-laki dan wanita dalam ayat adalah yang telah dewasa, masing-masing mereka mendapatkan hak warisan dari ibu bapak dan karib-kerabat mereka. Tegasnya dalam ayat itu Allah menjelaskan bahwa harta warisan atau harta pusaka bukan

dominasi kaum laki-laki saja, seperti yang pernah terjadi pada masa pra-Islam (zaman Jahiliyah), akan tetapi harta itu milik bersama laki dan perempuan. Sementara ulama yang lain memahaminya secara umum, baik laki-laki dan wanita yang masih kecil maupun yang sudah dewasa sama-sama mendapatkan harta warisan dari ibu bapak dan karib-kerabatnya.⁸

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa prinsip yang harus digunakan dalam kewarisan adalah prinsip bilateral dalam arti memberlakukan hak yang sama antara laki-laki dan wanita. Ketentuan ini merupakan perubahan totalitas dari sistem yang diterapkan pada masa pra-Islam yang bersifat diskriminatif dan merupakan ketentuan barbar yang jauh dari semangat keadilan dan pemerataan.

Kedua, prinsip moral, maksudnya adalah ketika dilaksanakan pembagian harta warisan itu dihadapan umum yang hadir di sana orang-orang yang tidak mendapatkan harta warisan disebabkan tidak ada hubungan nasab, kekerabatan, mereka terhibat dan atau ada *mani*? (penghalang kewarisan), maka al-Quran mengajarkan prinsip moral sebagaimana firman Allah:

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

*Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang baik.*⁹

Ayat di atas secara zahir menyuruh memberikan sesuatu terhadap orang-orang yang menyaksikan pembagian harta warisan. Namun dikalangan ulama berbeda pendapat menilai status ayat itu, apakah *muhkam* (tetap) ataupun *man-sukhab* (dihapuskan). Menurut Ibn Musayab, Dhahak, Ibn Abbas pada riwayat 'Atha' mengatakan bahwa ayat itu telah dinasekhkan dengan ayat ke-11 dari surat an-Nisa'. Pendapat Ibn Abbas yang berasal dari riwayat 'Ikrimah dan mayoritas ahli tafsir mengatakan bahwa ayat di atas masih tetap (*muhkam*).

Di samping itu juga ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukum pemberian itu apakah wajib hukumnya ataupun sunat (an-juran). Ada ulama yang mengatakan bahwa hukum memberikan itu hukumnya wajib berdasarkan zahir nash, artinya ahli waris wajib memberikan sesuatu kepada mereka yang ikut menyaksikan pembagian harta warisan itu dengan ukuran sesuai dengan

yang terbaik menurut mereka. Sementara ahli *fiqh* Mesir berpendapat bahwa pemberian itu hukumnya sunat, sebab kalau wajib tentu Allah menentukan pembagiannya dengan jelas dan kalau wajib tentu orang miskin akan menuntut hak itu.¹⁰

Imam al-Maraghi dalam tafsirnya menjelaskan akan rahasia yang terkandung dari an-juran untuk memberikan atau menyisihkan sedikit harta bagi orang-orang yang menyaksikan pelaksanaan pembahasan harta warisan dikarenakan peristiwa semacam itu sangat mudah memancing timbulnya sifat hasad dalam jiwa mereka, dan untuk menghilangkan hal-hal negatif yang akan muncul maka sepantasnyalah untuk mengasih dan memperhatikan mereka dengan cara menyisihkan dari harta itu guna dihibahkan kepada mereka. Dengan cara seperti itu hubungan silaturrahmi tetap terjalin dan sekaligus ini merupakan wujud dari bersyukur kepada Allah atas nikmat-Nya.¹¹

Mau'izhah (pelajaran) yang dapat dipetik dari ayat di atas adalah pada suasana pembagian harta warisan atau harta pusaka itu berlangsung rasa empati dan solidaritas terhadap sesama tetap dibangun, terutama bagi orang-orang yang menyaksikan secara langsung pembahasan tersebut, meskipun mereka secara hukum tidak mendapatkan bagian dari harta itu disebabkan tidak adanya hubungan nasab dan kekerabatan dan atau terdapat adanya halangan (*mani*) syar'i.

Melalui pesan Allah dalam ayat di atas terlihat bagaimana Allah senantiasa mengugesti manusia untuk tetap menjalin persaudaraan melalui ketentuan pembagian harta warisan yang tentu saja pesan moral tersebut akan berdampak positif/mashlahah bagi pihak-pihak yang terlibat.

AHLI WARIS (ASHHABUL FURUD) DAN BAGIANNYA

Dalam al-Quran dijumpai ayat-ayat yang menerangkan tentang kewarisan secara rinci, dan dapat dikatakan diantara sekian banyak materi-materi *fiqh* yang dikemukakan al-Quran, pengaturan tentang kewarisan termasuk yang paling jelas dan rinci/detail disebutkan. Untuk mengetahui siapa-siapa saja yang berstatus ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing dapat dilihat pada firman Allah di bawah ini:

Surat An-Nisa' Ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُّ مِمَّا تَرَكَ ۚ إِنَّ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَوَرَثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِلثَلَاثِ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ السُّدُّ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يُوْصِي بِهَا أُوْهُ دِينِ ۚ وَبِأَزْوَاجِكُمْ لَا تَدْرُونَ لَهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ شَيْئًا فَرِصَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Setelah Allah menerangkan hukum kewarisan secara umum, seperti firman-Nya "*Lirijali nashibun mimma taraka waliddaini wa al-aqrabun wa li Nisa' i nashibun...*", selanjutnya dikemukakan secara rinci penjelasan hukum-hukum kewarisan dan ketentuan-ketentuannya sebagai wujud pembatalan terhadap aturan kewarisan yang pernah dipraktikkan oleh orang Arab pra-Islam atau masa Jahiliyah¹² yang tidak memberikan hak warisan kepada wanita dan anak-anak. Begitu pula Islam datang melarang memberlakukan sebagian ahli waris yang pada masa Jahiliyah mereka mendapatkan harta warisan.¹³ Setelah turunnya ayat-ayat yang menerangkan hukum-hukum kewarisan (*al-hukmu al-fara'id*), maka ditetapkan secara permanen dari sebab-sebab kewarisan itu ada tiga, yaitu; **Pertama**, sebab ada hubungan nasab (keturunan) baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu. **Kedua**, sebab adanya ikatan pernikahan yang sah antara suami dan isteri. **Ketiga**, sebab *al-walaa'*¹⁴ (sebab terjadinya pembebasan budak).¹⁵

Sebab Turun Ayat

Sebab turun ayat ke-11 dari surat an-Nisa' berkenaan dengan isteri Sa'ad bin Rabi' datang menghadap Rasulullah Saw. untuk menyampaikan masalah. Ketika itu ia berkata: "Wahai Rasulullah, dua orang putri ini adalah anak Rabi' yang telah mengikuti peperangan bersama engkau dan gugur di medan Uhud. Sepeninggal Rabi', paman kedua anak ini telah mengambil seluruh harta kekayaan peninggalannya. Sedangkan dua anak ini akan sulit mendapatkan jodoh kalau tidak memiliki harta kekayaan". Sehubungan dengan pertanyaan itu Rasulullah Saw bersabda: "Allah akan memberikan keputusan hukum dalam masalah ini". Sesat kemudian Allah menurunkan ayat ke-11 sampai de-

ngan ayat ke- 14 yang menegaskan tentang hukum warisan dalam Islam. Lalu kemudian Rasul menjumpai paman keduanya dan bersabda: "Berikanlah kepada kedua puteri Sa'ad sebanyak $\frac{2}{3}$ dan kepada ibunya sebanyak $\frac{1}{8}$ dan ¹⁶

Merujuk kepada informasi ayat ke-11 surat an-Nisa' di atas dapat diperoleh hukum-hukum yang berkenaan dengan pembagian harta waris sebagai berikut:

1. Bagian anak laki-laki dan anak perempuan
 - a. Anak laki-laki mendapat semisal dua bagian anak perempuan. Hal ini berlaku apabila mayit meninggalkan ahli waris seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan saja, maka keduanya berbagi harta. Dan apabila ahli warisnya merupakan gabungan antara laki-laki dan perempuan, maka mereka mewarisi harta dengan cara memberi lelaki mendapat dua bagian dan anak perempuan mendapat satu bagian.
 - b. Apabila bersama anak-anaknya terdapat pewaris yang telah ditentukan bagiannya, seperti suami dan isteri atau ibu bapak, maka diberikan kepada ahli waris itu terlebih dahulu, kemudian dibagikan sisanya di antara anak-anak sebagaimana ketentuan di atas.
 - c. Apabila seorang mayit meninggalkan seorang anak laki-laki saja, maka ia mengambil seluruh harta. Walaupun ayat tersebut tidak menyebutkan dengan jelas, tetapi dapat dipahami dari teks ayat di atas.¹⁷
2. Bagian ibu dan bapak
 - a. Ibu dan bapak, masing-masing mendapat $\frac{1}{6}$, jika mayit mempunyai anak atau cucu (cabang) yang mewarisi.
 - b. Apabila mayit tidak mempunyai anak dan hanya ibu dan bapak, maka ibu mewarisi $\frac{1}{3}$ harta dan sisanya $\frac{2}{3}$ diwarisi oleh bapak.
 - c. Apabila mayit meninggalkan beberapa saudara (dua atau lebih) di samping bapak dan ibu, maka ibu mewarisi $\frac{1}{6}$ dan sisanya $\frac{5}{6}$ diambil oleh bapak. Saudara lelaki atau perempuan tidak mendapat apa-apa, karena bapak menutup (menghijab) mereka.
3. Hukum pelaksanaan wasiat dan hutang

Ayat di atas secara zhahirnya menunjukkan bahwa wasiat didahulukan sebelum hutang, padahal yang benar adalah kebalikannya, yaitu hutang yang didahulukan. Rasulullah memutuskan hutang si mayat dibayar terlebih dahulu kemudian ditunaikan wasiatnya.

Ayat di atas secara zhahirnya menunjukkan bahwa wasiat didahulukan sebelum hutang, padahal yang benar adalah kebalikannya, yaitu hutang yang didahulukan. Rasulullah memutuskan hutang si mayat dibayar terlebih dahulu kemudian ditunaikan wasiatnya.

Hikmah kenapa didahulukan hutang adalah karena hutang itu tetap dalam tanggungan orang yang berhutang sebelum ia wafat dan sesudahnya. Ia dituntut oleh orang yang menghutangi dan juga ahli warisnya dituntut hingga membayarkan haknya. Lain halnya dengan wasiat yang merupakan sumbangan semata-mata. Tidak ada manusia yang menuntutnya. Agar orang tidak meremehkannya dan supaya para ahli waris tidak kikis untuk menunaikannya, maka Allah Swt mendahulukan penyebutannya.

Pada penghujung ayat itu Allah sampaikan “(Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak tahu siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu”. Maksudnya Allah sendiri yang mengatur pembagian warisan itu dan tidak menyerahkannya kepada seorangpun dari makhluk-Nya, sebab betapun manusia ingin mewujudkan keadilan, maka mereka tidak akan mencapainya dengan bentuk yang lebih sempurna. Mereka tidak akan dapat melakukan pembagian yang adil seperti ini, sebab mereka tidak mengetahui keadaan orang tua dan anak dan tidak memahami mana di antara mereka yang terdekat manfaatnya.¹⁸

Surat An-Nisa' Ayat 12

وَلَكُمْ يَصِفُ مَا تَرَكُوا أَزْوَاجَكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ هُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرِّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دِينٍ وَهُنَّ الرِّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ السُّنْثَىٰ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دِينٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ أَثَرٌ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّى بِهَا أَوْ دِينٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةٍ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ

Dalam ayat di atas diterangkan porsi pembagian warisan suami isteri dan begitu pula bagian saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu, serta penjelasan tentang *kalalah*. Berikut akan dikemukakan bentuk bagian masing-masing sebagai berikut:

1. Bagian warisan suami dan isteri
 - a. Apabila isteri wafat dan tidak meninggalkan cabang (anak atau cucu) yang mewarisi, maka bagian suami adalah 1/2. Dan bila isteri wafat lalu meninggalkan cabang (anak atau cucu) yang mewarisi, maka bagian suami adalah 1/4.
 - b. Apabila suami wafat dan tidak meninggalkan cabang (anak atau cucu) yang mewarisi, maka bagian isteri atau beberapa isteri 1/4. Dan bila suami wafat dan meninggalkan cabang (anak atau cucu), maka bagian isteri atau beberapa isteri 1/8.
 - c. Dengan membandingkan antara keadaan suami isteri, kita dapati selalu bahwa bagian laki-laki adalah dua kali bagian perempuan karena adanya hikmah keadilan yang tersimpan pada aturan tersebut.¹⁹
2. Bagian warisan saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu.
 - a. Apabila seseorang wafat dan meninggalkan seorang saudara laki-laki seibu saja atau seorang saudara perempuan seibu saja, maka masing-masing dari mereka mendapat 1/6.
 - b. Apabila seseorang wafat meninggalkan lebih banyak dari itu, yakni: (dua orang saudara laki-laki seibu atau dua saudara perempuan seibu), maka mereka mendapat 1/3 yang dibagi sama rata. Hal ini sesuai dengan firman Allah “*fahum syuraka'a fi sulus*”, artinya: maka mereka ber-sama-sama pada yang sepertiga itu.

Yang dimaksud dengan saudara-saudara di sini adalah saudara seibu dan bukan saudara kandung atau saudara seapak. Dalilnya adalah sebagian bacaan yang kuat, yaitu bacaan Sa'ad bin Abi Waqash: “*wa lahu akhun auw ukhtun min ummin*”.

Para ulama sepakat bahwa saudara dalam ayat ini adalah saudara seibu. Dalilnya bahwa Allah menyebutkan warisan saudara-saudara dua kali, pertama di sini dan kedua di akhir surat ini. Di sini bagianya ditetapkan antara 1/6 dengan 1/3, semetara pada akhir surat ini ditetapkan bagiannya antara 1/2 dengan 2/3. Hal ini sebagai indikator bahwa saudara seapak lebih dekat dibanding saudara seibu, maka wajar bagiannya lebih besar.

3. Maksud “*al-Kalalah*”

Kalalah artinya: seseorang yang wafat tanpa meninggalkan ayah maupun anak. Ulama sepakat mendefinisikan *kalalah* itu orang yang tidak

punya pokok dan cabang. Dalilnya Abu Bakar ash-Shiddiq r. a berkata: "Aku mempunyai sebuah pendapat mengenai kalalah. Jika pendapatku benar maka ia berasal dari Allah dan jika pendapatku salah, maka ia berasal dari aku dan dari syaitan, bukan dari Allah. Seungguhnya *kalalah* artinya orang yang mati tanpa meninggalkan ayah dan anak".

Pendapat sebagian ulama mengatakan bahawa *kalalah* adalah seseorang yang mati tanpa meninggalkan anak.

4. Maksud wasiat yang membahayakan ahli waris

Ayat di atas menunjukkan bahawa wasiat dan hutang yang tujuannya untuk menimbulkan bahaya tidaklah wajib dilaksanakan. Wasiat yang menimbulkan bahaya bila seseorang berwasiat melebihi sepertiga harta. Sedangkan menimbulkan bahaya dalam hutang adalah bila mengaku bahwa mayat mempunyai hutang sehingga merugikan ahli waris, padahal mayat tidak berhutang.

Surat an-Nisa' ayat 176

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ أَمْوَالَكُمْ لَيْسَ لَهُ وَكْلٌ أَوْلَتْهَا نَفْسٌ
 مَّا تَرَكُ وَهُوَ رَافِعٌ إِنَّ لِمَنْ يَكُنْهَا كَالْفِئَةِ ثَلَاثٌ إِنَّ تَرَكَ وَلَئِنْ كَانُوا
 إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذِي هُوَ حِطٌّ الْأَسْنَنِ بَيْنَ اللَّهِ لَكُمْ أَنْ تَعْزِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
 عَلِيمٌ

Ayat di atas merupakan ayat terakhir yang berisikan tentang *ashhabul furudh* (ahli waris) dan bagiannya. Ahli waris yang disebutkan dalam ayat itu adalah saudara kandung (*akhun syaqiq*) dan saudara seapak. Untuk lebih jelasnya akan diutarakan bagian mereka sebagai berikut:

1. Apabila seseorang wafat dan meninggalkan seorang saudara perempuan seayah seibu atau seayah dan tidak mempunyai bapak dan anak, maka saudara perempuan seayah mendapat 1/2 harta peninggalan.
2. Apabila seorang wafat dan meninggalkan dua saudara perempuan seayah seibu atau lebih atau seayah, sedang ia tidak punya bapak maupun anak, maka kedua saudara perempuan seayah seibu atau seayah mendapat 2/3 dari harta peninggalan.

3. Apabila seseorang wafat dan meninggalkan saudara laki-laki dan saudara perempuan (kandung atau seayah), maka harta itu dibagi untuk keduanya dengan dasar bagian laki-laki dua kali bagian perempuan.

4. Apabila saudara perempuan kandung wafat dan tidak meninggalkan ayah maupun anak, maka saudara laki-laki kandung mendapatkan seluruh harta. Bila terdapat lebih dari satu orang saudara laki-laki, maka mereka membagi harta sesuai dengan jumlah orangnya.²⁰

Demikianlah ketentuan hukum waris dalam ayat-ayat al-Quran yang berkenaan dengan ahli waris dan porsi bagiannya masing-masing. dipaparkan secara rinci atau detail yang senantiasa dikaitkan dengan kasus perkara yang terjadi ketika seseorang meninggal dunia. Bila dicermati dengan penuh seksama akan terlihat begitu indahny hukum Allah yang sarat dengan nilai keadilan dan *mashlahah* bagi umat manusia. Agaknya tepat sekali firman Allah yang artinya: "Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin".²¹

HUKUM KEWARISAN MENURUT HADIS

Dalam beberapa kitab hadis dan *fiqh* istilah waris disebut dengan *al-fara'idh jama'* dari *faridah* yang berarti *al-Qath'u* (kepastian). Khusus kewarisan dinamakan *al-fara'idh* berdasarkan firman Allah "*nashiban mafrudha*" yang berarti ketentuan yang pasti (dikenal).

Diantara ketentuan kewarisan Islam yang berdasarkan hadis Nabi Saw adalah riwayatkan Ibn Abbas: "أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «الْحَقُّ الْفَرَاغُ بِأَهْلِهَا مَا بَقِيَ مِنْهُ»", artinya: *Nabi Saw bersabda: Berikanlah harta warisan itu kepada yang berhak menerimanya. Sisanya untuk orang laki-laki yang utama.* Menurut Ibn Bathal yang dimaksud dengan "*aula rajulin*" adalah laki-laki itu berstatus sebagai *ashhabah* setelah *ahl al-furudh*, karena mereka itu lebih dekat kepada mayat dan lebih berhak. *Ashhabah* yang paling dekat adalah anak laki-laki kemudian anak laki-laki dari mereka (cucu lelaki) sampai berikutnya, bapak, kakek dan seterusnya. Seandainya tidak ada *ashhabah* dari pihak laki-laki, maka sisa harta dapat diberikan kepada orang yang tidak mendapatkan bagian waris dari pihak wanita.²²

Hadis di atas mengatur tentang peralihan harta warisan atau harta pusaka dari orang yang meninggal dunia (pewaris) kepada orang yang masih hidup (ahli waris) sesuai dengan aturan-aturan yang diterapkan berdasarkan ayat-ayat al-Quran. Jika setelah itu terdapat sisa harta, maka menjadi milik pihak laki-

laki yang berkedudukan sebagai ashabah. Dengan demikian porsi bagian laki-laki lebih besar dibandingkan bagian perempuan.²³

Berdasarkan keterangan ayat-ayat waris dan kemudian dilanjutkan penjelasannya oleh hadis Nabi Saw, maka ahli waris dalam Islam secara umum dapat dikategorikan kepada dua macam, yaitu: *Pertama, Ashhabul furudh* adalah ahli waris yang secara pasti mendapatkan bagian tertentu dari harta warisan yang ditinggalkan si mayit. Terdiri dari 4 orang dari kalangan laki-laki meliputi: ayah, kakek dan seterusnya ke atas, saudara seibu, dan suami. Dan 8 orang dari kalangan perempuan, mereka itu adalah: Ibu, nenek terus ke atas, anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki (cucu perempuan), saudara perempuan, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, dan isteri.²⁴ *Kedua, 'ashabah* ialah kelompok ahli waris yang berhubungan dengan si mayit, yaitu setiap laki-laki yang antara dia dengan si mayit dalam silsilah nasabnya tidak pernah terselang dengan ahli waris perempuan. Contohnya anak laki-laki si mayit, dan saudara kandung laki-laki atau saudara kandung seayah, dan begitu seterusnya.²⁵

PENAFSIRAN PENGALAN AYAT “لَا ذَكَرَ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثَىٰ”

Penggalan ayat “لَا ذَكَرَ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثَىٰ” (bagian laki-laki semisal bagian dua anak perempuan) memotivasi para peneliti untuk mendalaminya dengan memunculkan pertanyaan apakah pembagian seperti ini berdimensi keadilan ataukah bagian ini menunjukkan adanya diskriminasi antara anak laki-laki dan anak perempuan (bias gender)? Selanjutnya apakah mutlak diterapkan seperti itu? Ataukah dapat disesuaikan dengan perkembangan dinamika budaya manusia?. Berikut ini akan dipaparkan pendapat para ahli tafsir dan pakar hukum Islam sebagai berikut:

Menurut Abu Ja'far ayat-ayat waris di atas di turunkan kepada Nabi Muhammad Saw sebagai penjelasan dari Allah tentang wajibnya diterapkan hukum kewarisan bagi orang yang meninggal dunia sementara ia mempunyai ahli waris, karena pada masa Jahiliyah pembagian kewarisan cenderung bersifat diskriminatif yang fokus penilaiannya adalah peperangan atau orientasi materi semata dan bukan atas dasar pertimbangan nasab/keturunan.²⁶

Allah sengaja memformat firman-Nya dengan kalimat **وَصِيْبِكُمْ** الله في أولادكم, kata wasiat berarti: suatu pesan yang ditinggalkan kepada orang lain untuk dilaksanakan. Secara hakekat berupa perintah melakukan sesuatu sesuai dengan pesan yang diterima. Dalam konteks hukum kewarisan yang dimaksud kata

wasiat dalam ayat adalah: Allah memerintahkan dan memfardhukan terhadap kamu perihal anak-anak yang akan kamu tinggalkan nanti berkenaan dengan kewarisan mereka terhadap harta peninggalanmu, baik mereka itu laki-laki atau perempuan, besar atau kecil sama-sama berhak atasnya.²⁷ al-Razi mengatakan bahwa *al-isha'* itu bermakna *al-ishal* yang berarti: Allah menyampaikan informasi agar kamu menyempurnakan hak-hak anakmu setelah kematian menimpamu.²⁸

Muhammad Ali As-Sayis mengatakan bahwa penjelasan Allah sampai *فِي* *awladikum*²⁹ masih bersifat global (umum), penjelasan rinci tentang hukum kewarisan dapat dilihat pada firman Allah berikutnya “لَا ذَكَرَ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثَىٰ”, artinya *bagian anak laki-laki seumpama bagian dua anak perempuan*. Menurut Rasyid Ridha penggalan ayat ini berupa awal penjelasan wasiat Allah dalam kewarisan anak-anak dan didahulukan penjelasan ini, karena dianggap paling penting dan prioritas pada hukum kearisan Islam. ungkapan ini mengisyaratkan pembatalan praktek Jahiliyah yang tidak memberikan hak kepada anak perempuan, maka melalui ayat-ayat ini seakan Allah menjadikan kewarisan anak perempuan diterapkan secara *ma'ruf* (wajit) yang sebelumnya tidak mendapat apa-apa, berbeda dengan anak laki-laki.³⁰

Hikmah dijadikan bagian anak laki-laki seumpama bagian dua anak perempuan adalah seorang laki-laki punya tanggungan nafkah terhadap diri dan keluarganya (isteri dan anak), jadi wajarlah ia mendapat dua bagian. Sedangkan perempuan kewajibannya menafkahi dirinya sendiri, akan tetapi bila dia bersuami kewajiban nafkah terhadap dirinya berpindah menjadi tanggung jawab suaminya. Substansinya dengan ungkapan seperti ini bagian kewarisan perempuan justru lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki pada kondisi tertentu bila dihubungkan kepada nafkah keduanya.³¹

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Ibn Katsir (w. 774 H.) ketika menafsirkan penggalan ayat ke-11 tersebut sebagai berikut: “Allah memerintahkan kamu untuk menegakkan keadilan (*adl*) dalam hal (pembagian warisan) untuk mereka (anak-anak kamu). Sesungguhnya kaum Jahiliyah dahulu membagikan seluruh harta warisan hanya kepada anak laki-laki saja. Tak seorang wanita pun memperoleh bagian. Kemudian Allah memerintahkan (umat Islam) pada asal pembagian warisan untuk membagi rata (*taswiyah*) harta warisan di antara mereka, dan Allah membedakan pembagian itu di antara dua jenis (laki dan perempuan); Allah memberi seorang anak lelaki bagian yang sama dengan bagian dua anak perempuan. Demikian itu karena lelaki

memburuhkan (dana yang lebih banyak) untuk menanggung nafkah keluarga, beban berbisnis/berdagang, dan menanggung beban kehidupan yang lainnya. Maka, pantaslah anak laki-laki diberi dua kali lipat bagian lebih besar dari bagian seorang anak perempuan".³²

Ali Ash-Shabuni lebih konkrit lagi menjelaskan kenapa bagian laki-laki lebih besar dari anak perempuan pada hal ia lebih lemah dan lebih memerlukan harta, antara lain: *Pertama*, wanita itu dicukupi biaya dan kebutuhannya. Maka ia wajib diberi nafkah oleh suaminya atau putranya atau ayahnya atau saudara lelakinya atau para kerabat lainnya. *Kedua*, wanita tidak dibebani untuk memberi nafkah kepada seseorang. Sebaliknya seorang lelaki diwajibkan memberi nafkah kepada keluarga dan para kerabat lainnya. *Ketiga*, nafkah yang dikeluarkan orang lelaki lebih banyak dan kewajiban-kewajiban keuangannya lebih besar, maka kebutuhannya kepada harta lebih banyak daripada kebutuhan wanita. *Keempat*, orang laki-laki membayar mahar kepada wanita dan diwajibkan mengeluarkan biaya tempat tinggal, makanan, pakaian bagi isteri dan anak-anaknya.³³

Walaupun Islam memberi bagian laki-laki dua kali lipat dari wanita, namun ia tetap melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada wanita dan memberikannya lebih dari yang dibayangkannya. Dalam keadaan demikian wanita lebih banyak memperoleh kesejahteraan dan kenikmatan daripada laki-laki, sebab ia ikut mendapat bagian dalam waris tanpa memikul tanggung jawab. Wanita mengambil bagiannya dan tidak memberi apa-apa. Ia mendapat hasil dan tidak wajib mengeluarkan biaya penghidupan.³⁴

Pola penafsiran dan pendapat yang berbeda dengan ulama di atas dikemukakan oleh Nashr Hamid Abu Zayd yang menafsirkan ayat mawaris di atas dengan pendekatan historis. Dia berpendapat bahwa signifikansi/pesan utamanya ayat itu adalah pembatasan terhadap bagian kaum laki-laki.³⁵

Pendapat senada juga dikemukakan oleh Muhammad Syahrur bahwa bagian anak laki-laki merupakan batas maksimal (*al-Hadd al-a'la*), sementara bagian anak perempuan dipandang sebagai batas minimal (*al-Hadd al-adna*). Hal ini berarti bahwa anak laki-laki tidak boleh mendapat warisan lebih besar dari dua kali lipat bagian anak perempuan, tetapi boleh kurang dari itu, dan anak perempuan tidak boleh mendapatkan lebih kecil dari 50% bagian lelaki, tetapi boleh lebih besar dari itu, sesuai dengan kondisi masyarakat dan tuntutan zaman.³⁶

Amina Muhsin-Wadud, seorang feminis berkebangsaan Amerika-Afrika, mengemukakan ikut mempertanyakan terutama berkaitan erat dengan konsep keadilan yang selalu dinamis itu. Ia berpendapat bahwa sistem pembagian dua banding satu (2:1) yang terdapat pada ayat ke-11 surat an-Nisa' tidaklah harus diamalkan secara mutlak, tetapi dapat ditafsirkan ulang dengan mempertimbangan kondisi masyarakat.³⁷

Berdasarkan pendapat ulama dan pakar hukum Islam di atas maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan bagian antara anak laki-laki dan anak perempuan (2:1), ada yang memahami secara literal sesuai dengan konteks ketika ayat itu diturunkan, bahwa pembagian dua banding satu itu telah menunjukkan keadilan dan mutlak untuk diterapkan dalam hukum kewarisan. Alasan utama yang diangkatkan adalah dari segi aspek tanggung jawab, dimana laki-laki memiliki tanggung jawab yang jauh lebih berat ketimbang perempuan.

Namun demikian adapula yang memahami dalam perspektif yang berbeda. Menurut pendapat mereka penetapan itu tidak terlepas dari konteks historis turun ayat yang mana kaum perempuan tidak mendapat apa-apa dari harta peninggalan kerabatnya. Kemudian ayat turun memberikan bagian terhadap mereka, berawal dari titik nol menuju 50%. Pesan utamanya bukanlah perbandingan (2:1), akan tetapi wanita mendapat bagian dan aspek keadilan. Akan tetapi apabila situasi dan kondisi sosial telah berubah akan membawa perubahan nilai keadilan, maka perimbangan pembagian itu dapat saja dikaji ulang.

PRINSIP KEADILAN DALAM HUKUM WARIS ISLAM

Mencermati pendapat Ibn Katsir di atas yang menangkap pesan moral dari ayat tersebut, yakni *keadilan*, dan perbedaan prosentasi pembagian harta pusaka untuk anak laki-laki dan anak perempuan, menurutnya disebabkan oleh perbedaan beban kehidupan yang bisa dipandang sebagai alasan penetapan hukum warisan. Bagaimana jika kondisi ini berubah, seperti halnya jika kaum hawa juga ikut serta dalam menanggung beban materi kehidupan dan berperan dalam bidang bisnis? Dalam hal ini Ibn Katsir tidak memberikan penjelasan. Beliau justru tampak lebih cenderung memandang aturan pembagian harta warisan yang disebutkan secara literal sebagai aturan yang sesuai, dan implikasinya aturan itu harus diterapkan di segala zaman dan tempat. Dengan kata lain, Ibn Katsir memandang makna literal teks tersebut sebagai alasan utamanya dan bersifat final. Adapun penetapan hukum tentang

Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran surat at-Thalaq ayat 6 Allah berfirman:

أَسْكِنُوهُمْ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُمْ لِأُصْغَرُوا عَلَيْهِمْ وَإِنْ كُنْ أُولَاتٍ خَلَلْتُمْ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَصْغُرَ خَلَلُكُمْ فَإِنْ أَرْضَعْتُمْ لَهُمْ فَأَتَوْهُنَّ أَجُورُهُنَّ وَيَأْمُرُوا بِتَنكِحِكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَرْصُوعٌ لَهُ أُخْرَى

Berikutnya dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 Allah berfirman:

وَالْأَوْدَانِ يَرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَتَّى كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْزِلَهُنَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ بَيْنَهُمَا بِالْمَعْرُوفِ وَأَمَّا اللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

... Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf...

Penjelasan yang sama juga dijumpai dalam aturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif) di Indonesia tepatnya pada Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu Pasal 34 ayat (1) menyatakan: "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya".⁴²

Sedangkan kewajiban isteri pada dasarnya adalah mengatur urusan intern rumah tangga dengan sebaik-baiknya.⁴³ Hal demikian juga berlaku dalam kedudukan sebagai ayah dan ibu pewaris.⁴⁴

Jika dalam satu kasus seorang anak perempuan dan juga saudara perempuan mendapat setengah dari harta peninggalan, maka pada hakikatnya jauh lebih besar dari perolehan laki-laki, sebab kekayaan laki-laki (termasuk dari bagian warisan) pada akhirnya akan pindah ke tangan wanita dalam bentuk pangan, sandang, dan papan, sehingga bagian laki-laki akan lebih dahulu habis. Sebaliknya kekayaan perempuan akan tetap utuh tidak berkurang, jika di-

pembagian dua banding satu merupakan penetapan adil yang dapat diterima oleh akal manusia.

Pembagian dua banding satu dipandang sebagai aturan yang adil sesuai dengan pemahaman masyarakat ketika itu. Hal ini diketahui dari konteks historis bangsa Arab pada masa itu, di mana orang-orang yang berhak mendapatkan harta pusaka adalah kaum laki-laki yang mampu berperang. Kaum perempuan sama sekali tidak mendapatkan bagian dalam hak mewarisi dari harta tersebut. Pembagian itu dianggap adil, karena telah memberikan bagian tertentu bagi kaum perempuan yang sebelumnya tidak mendapat apa-apa sebagai sesuatu yang apat diterima dan sesuai dengan rasa keadilan historis.

Asas keadilan dalam hukum kewarisan Islam mengandung pengertian bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh dan harta warisan dengan kewajiban atau beban kehidupan yang harus ditanggung di antara para ahli waris,³⁸ karena itu arti keadilan dalam hukum waris Islam bukan diukur dari kesamaan tingkatan antara ahli waris, tetapi ditentukan berdasarkan besar-kecilnya beban atau tanggung jawab yang diemban kepada mereka ditinjau dari keumuman hal-ihwal kehidupan manusia.

Jika dikaitkan dengan definisi keadilan yang dikemukakan oleh bapak Amir Syarifuddin sebagai "keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan",³⁹ atau perimbangan antara beban dan tanggung jawab diantara ahli waris yang sederhana, maka kita akan melihat bahwa keadilan akan nampak pada pelaksanaan pembagian harta warisan menurut hukum Islam.

Rasio perbandingan 2:1, tidak hanya berlaku antara anak laki-laki dan perempuan saja, melainkan juga berlaku antara suami isteri, antara bapak-ibu serta antara saudara laki-laki dan saudara perempuan, yang kesemuanya itu mempunyai hikmah apabila dikaji dan diteliti secara mendalam.⁴⁰

Dalam kehidupan masyarakat muslim, laki-laki menjadi penanggung jawab nafkah untuk keluarganya, berbeda dengan perempuan. Apabila perempuan masih sendirian, maka ia menjadi tanggung jawab orang tuanya ataupun walinya. Sedangkan setelah menikah, maka ia menjadi tanggungan suaminya.

Syari'at Islam tidak mewajibkan kepada perempuan untuk menafkahkan hartanya bagi kepentingan dirinya ataupun kebutuhan anak-anaknya, meskipun ia tergolong mampu/kaya, jika ia telah bersuami,⁴¹ sebab memberi nafkah keluarga merupakan kewajiban yang dibebankan syara' kepada suami.

inginkannya.⁴⁵ Karena pada hakekatnya perempuan mengambil bagian dan tidak memberi apa-apa. Ia mendapat bagian warisan dan memperoleh nafkah, tidak sebaliknya.

Perbedaan yang berdasarkan besar kecilnya beban dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagaimana diuraikan di atas, berdasar hukum kausalitas (sunnatullah) imbalan dan tanggung jawab, bukan mengandung unsur diskriminasi. Forsi perempuan yang ditentukan tersebut seimbang dengan kewajibannya. Sebab dalam Islam, kaum perempuan dibebaskan dari memikul tanggungjawab ekonomi keluarga. Oleh sebab itu, jika seseorang menerima bagian waris besar, berarti hal itu merupakan manifestasi dari tingkat kewajibannya, yang merupakan konsep perbedaan secara sosiologis dalam masyarakat Islam.

Dengan demikian untuk memahami tentang adil atau tidaknya pembagian hukum kewarisan dalam Islam yang menganut asas 2 banding 1, alangkah lebih baiknya kita jadikan sebagai tolak ukur konsep keadilan yang diperkenalkan oleh salah seorang failosof Yunani bernama Aristoteles. Menurutnnya, ada dua macam keadilan itu, yaitu keadilan *distributif* dan keadilan *commutatif*. Keadilan *distributif* ialah keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya. Ia tidak menuntut supaya tiap-tiap orang mendapatkan bagian yang sama banyaknya, bukan persamaan, melainkan kesebandingan. Adapun keadilan *commutatif* ialah keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan.⁴⁶

Jika pemilahan keadilan yang ditawarkan oleh Aristoteles ini kita gunakan untuk menentukan keadilan yang dianut hukum kewarisan Islam dalam hal pembagian harta peninggalan, maka hukum kewarisan Islam telah memenuhi rasa keadilan tersebut. Bukan saja dari segi keadilan *distributif*, melainkan juga dari segi keadilan *commutatif*. Segi keadilan *distributif* terdapat pada asas dua banding satu itu. Maksudnya laki-laki mendapatkan dua bagian (2:1) yang berarti lebih besar dari pada bagian kaum perempuan. Sementara keadilan *commutatif* terletak pada pembagian harta pusaka yang tidak hanya menyintuh kaum laki-laki dan orang dewasa seperti yang dianut hukum kewarisan Yahudi, Romawi, dan Arab Jahiliyah, bahkan sebagian hukum waris adat zaman sekarang, akan tetapi juga memberikan bagian yang pasti kepada kaum perempuan dan anak-anak.

Seandainya dalam realitas masyarakat di suatu wilayah banyak kaum perempuan yang menjadi tulang punggung kehidupan ekonomi keluarga, hal

itu merupakan kenyataan sosiologis yang terjadi dan bukan karena tuntutan apalagi tuntutan hukum Islam, akan tetapi lebih disebabkan karena kerelaan kaum perempuan itu sendiri dalam rangka kerja sama keluarga yang sama sekali tidak dilarang dalam Islam. Akan tetapi partisipasi aktif kaum perempuan dalam memenuhi kebutuhan keluarganya tidak menjadi langsung sebab penyebab perubahan hukum waris Islam menjadi sebanding 1:1.⁴⁷

Di Indonesia pernah dikemukakan wacana yang menyatakan perbandingan 2:1 bukan ketentuan yang bersifat pasti dan tetap, sehingga dapat dikompromikan, di antaranya Zainuddin Sardar yang menyatakan bahwa setiap rumusan hukum yang terdapat pada nash al-Quran dan Hadis terdiri dari unsur-unsur:

1. Unsur Normatif yang bersifat abadi dan universal, berlaku untuk semua tempat dan waktu serta tidak berubah dan tidak dapat diubah.
2. Unsur Hudud yang bersifat elastis sesuai dengan keadaan dan waktu, tempat dan lokasi sebagaimana kaidah: "*Perubahan hukum (dapat terjadi) berdasarkan perubahan masa, tempat dan keadaan*".

Oleh sebab itu yang abadi dan universal ialah dalam hukum waris Islam di antaranya norma tentang hak dan kedudukan anak laki-laki dan perempuan untuk mewarisi harta warisan orang tua. Sedangkan mengenai besarnya bagian dalam perbandingan laki-laki dan perempuan dalam segala tingkatan yang sederhana merupakan aturan hudud yang dapat dilenturkan.⁴⁸

Meskipun demikian, pada kenyataannya rumusan Pasal 176 KHI yang dijadikan hukum meteril di lingkungan Peradilan Agama, ketentuan 2:1 tidak tergeser. Ketentuan 176 KHI yang tetap mempertahankan forsi 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan dilatarbelakangi para penyusun ataupun ahli hukum Islam yang terlibat dalam penyusunan Pasal 176 KHI meyakini ketentuan ayat tersebut bersifat sarif/tafsil dan *qath'i*, berdasarkan kepada teori standar konvensional yang menyebutkan bahwa "*perbedaan bagian laki-laki dan perempuan berdasarkan hukum imbalan dan tanggung jawab*".

PENUTUP

Akhir rangkaian bahasan tentang kewarisan dalam perspektif al-Quran, dapat dirumuskan beberapa inti sari kajian yang diformulasikan dalam kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam ketentuan kewarisan Islam yang bersumberkan al-Quran dan sunah mengatur dengan asas "Keadilan berimbang" yang berarti hukum waris is-

lam menentukan/menetapkan laki-laki dan perempuan sama-sama berhak tampil sebagai ahli waris, dengan besar bagian yang berbeda.

2. Berdasarkan nash yang *qath'i* bagian yang adil dan berimbang antara laki-laki dan perempuan adalah bagian 2:1.
3. Perbedaan forsi tersebut tidak disebabkan persoalan gender yang terkesan diskriminasi, melainkan atas perbedaan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada pihak laki-laki lebih besar/berat dibandingkan dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada perempuan. []

ENDNOTES

- ¹ Muhammad Farid Wajidi, *Dairah Ma'arif al-Quran al-'Iyyun*, (Beirut: al-Maktabah al-Islamiyah al-Jadidat, tt), Jilid. VII, h. 666
- ² Muh Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), Cet. I, h. 15 dan Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual: dari Normatif kepada Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), Cet. I, h. 8-9
- ³ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Ilmu Hukum Waris Menurut Ajaran Islam*, (Surabaya: Muriara Ilmu, tt.), h. 15
- ⁴ Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaq'if*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), Jld. III, h. 3
- ⁵ Maksud bilateral dalam hukum kewarisan Islam adalah seseorang menerima warisan dari kedua belah pihak kerabat, yaitu baik dari kerabat garis keturunan laki-laki maupun dari pihak kerabat garis keturunan perempuan auder-rechterlije). Lihat M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut BW*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), Cet. I, h. 116
- ⁶ Q. S. an-Nisa'/4: 7
- ⁷ Abdurrahman bin Abi Bakar bin Muhammad as-Suyuthi Abu Fadhal, *Lubabun Nuqul fi Asbab al-Nuzul*, (Beirut: Dar al-Ihya' al-'Ulum, tt.), Juz. I, h. 64
- ⁸ Muhammad Ali As-Sayis, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, (al-Qahirah: t. p., t. t.), h. 36-37
- ⁹ Q. S. an-Nisa'/4: 8
- ¹⁰ Muhammad Ali As-Sayis, *Op. cit*, h. 38
- ¹¹ Ahmad Mushatafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), Jld. II, h. 192
- ¹² Sebab-sebab mewarisi di masa Jahiliyah ada tiga macam: *Pertama*, sebab nasab (keturunan) yaitu berlaku bagi laki-laki yang dapat menunggang kuda, mengalahkan musuh di medan perang, serta mampu meraih kemenangan dengan membawa harta rampasan perang (ghanimah). Dan tidak diberlakukan ketentuan nasab ini bagi yang lemah, seperti wanita dan anak (mereka tidak mendapatkan hak sama sekali). *Kedua*, sebab Adopsi (*al-tabany*), yaitu bila seseorang angkat/menjadikan anak orang lain menjadi anaknya, maka bagi anak itu diberlakukan hukum seperti anak kandung dalam hal kewarisan dan lainnya. *Ketiga*, sebab sumpah dan janji setia, yaitu seseorang yang berkata kepada saudanya darahku darahmu, engkau mewarisi saya dan saya mewarisi engkau, engkau dapat menuntut saya dan saya pun dapat menuntut engkau. Bila

hal demikian telah disepakati, maka bila terjadi kematian kepada salah satunya yang lain akan mendapatkan harta si mayat.

¹³ Ketika Islam datang sebab-sebab mewarisi di masa Jahiliyah ada yang ditetapkan dan ada yang dibatalkan. Yang ditetapkan adalah sebab nasab dan sumpah setia (lihat. Q. S. an-Nisa'/4: 33). Sedangkan sebab adopsi (*al-tabany*) dibatalkan oleh Islam (lihat. Q. S. al-Ahzab/33: 4). Setelah Rsul Saw hijrah ke kota Madinah beliau menambah sebab saling mewarisi, yakni sebab hijrah (orang-orang yang hijrah bersama Rasul Saw saling mewarisi satu sama lainnya) dan persaudaraan (*al-muakhabah*) antara Muhajirin dan Anshar. Kedua sebab itu kemudian dibatalkan (dinasakkan) dengan ayat-ayat al-Quran (lihat Q. S. al-Ahzab/33: 6, dan Q. S. al-Anfal/8: 75. Lihat Ahmad Mushatafa al-Maraghi, *Op. cit*, h. 194-195

¹⁴ *Al-Wala'*: yaitu kerabat berdasarkan hukum dan dinamakan "*Wala'u al-itiq dan Wala'un nikmat*". Sebabnya ialah nikmat yang diberikan tuan yang membebaskan budaknya. Apabila seorang tuan membebaskan budaknya ia pun menghasilkan hubungan dan dikatakan yang dinamakan "*Wala'u al-itiq*". Dengan sebab itu tuannya mewarisi hartanya, sebab ia telah memberi kenikmatan kepada budaknya dengan mengembalikan kebebasan dan kemariannya. Oleh sebab itu Syari' (Allah dan Rasul-Nya) memberinya imbalan dengan memberinya waris setelah budak itu meninggal dunia dengan syarat ia tidak meninggalkan pewaris sama sekali, baik dengan sebab hubungan kerabat maupun dikatakan suami dan isteri. Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Ilmu Hukum Waris menurut ajaran Islam*, alih bahasa Zaid Husein Alhamid, (Surabaya: Muriara Ilmu, tt.), h. 31-32

¹⁵ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Quran al-Hakim, populer disebut Tafsir al-Manar*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt.), Juz. IV, h. 403

¹⁶ Abdurrahman bin Abi Bakar bin Muhammad as-Suyuthi Abu Fadhal, *Op. cit*, h. 64

¹⁷ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Op. cit*, h. 17

¹⁸ *Ibid*, h. 18-20

¹⁹ *Ibid*, h. 22

²⁰ *Ibid*, h. 23-24

²¹ Baca Q. S. al-Maidah/5: 50

²² Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subulu al-Salam*, (Bandung: Dahlan, tt.), Juz. III, h. 98

²³ Beberapa ketentuan bagian ahli waris yang tidak dijelaskan dalam ayat diterangkan dalam hadis, antara lain: pertama, dari Ibn Mas'ud menjelaskan perihal kasus anak perempuan bersama cucu perempuan dari anak lelaki, dan saudara perempuan. Nabi Saw memutuskan bagi anak perempuan 1/2, bagi cucu perempuan 1/6, sempurna menjadi 2/3, dan sisanya untuk saudara perempuan (H. R. Bukhari). Kedua, dari Baridah bin Hashib bahwa Nabi Saw menetapkan bagian nenek 1/6 bila tidak ada bersamanya ibu (H. R. Abu Daud).

²⁴ Muhammad Amin summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 114

²⁵ Muhammad Mahyuddin Abdul Hamid, *Ahkam al-Mawaris fi Syari'ah al-Islamiyah 'ulu Madzhab al-Imamah al-Arba'ah*, (t. k.: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1984), h. 69-70

²⁶ Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir Abu Ja'far al-Thabari, *Jami'ul Bayan fi Ta'wil al-Quran*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.

²⁷ Ahmad Mushtafa al-Maraghi, *Op. cit*, h. 195-196

²⁸ Muhammad Rasyid Ridha, *Op. Cit.*, h. 404-405

²⁹ Kata *aulad* dalam ayat maksudnya adalah anak-anak yang beriman sebab yang dikhitab adalah mereka yang mukmin. Lafazh "*auladukum*" adalah umum yang dimaksud dengannya khusus. Ada beberapa kondisi yang menyebabkan anak tidak mendapatkan hak waris, yaitu: pertama, kafir berdasarkan firman Allah dalam surat Hud ayat 45-46 dan sabda Nabi Saw ﷺ: لا يرث الكافر. Kedua, pembunuhan sengaja terhadap ibu-bapaknya berdasarkan sunah dan ijma'. Ketiga, budak berdasarkan ijma' ulama kondisi budak menjadi penghalang. Keempat, ahli waris Nabi Saw termasuk yang dikecualikan sabda Nabi Saw: لا يرث النبي ولا آل النبي (Ahmad Mushafa al-Maraghi, *Op.cit.*, h. 196 dan bandingkan dengan Muhammad Rasyid Ridha, *Op. cit.*, h. 407).

³⁰ *Ibid.*, h. 406

³¹ *Ibid.*

³² 'Imaduddin Abi Fida Isma'il bin 'Umar bin Katsir, *Tafsir al-Quran al-'Azhiim (Tafsir Ibn Katsir)*, (Riyadh: Darussalam li an-Nasyr wa Tauzi', 1418 H.), Jld. I, h. 299

³³ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Op. cit.*, h. 13

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Nashr Hamid Abu Zayd, *Dawa'ir al-Khauf* (Beirut: al-Markaz ats-Tsaqafi al-'Arabi, 1999), h. 233

³⁶ Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa al-Quran*, (Damaskus: al-Ahali, 1990), h. 98

³⁷ Amina Muhsin-Wadud, *Quran and Woman*, (Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti, 1992), h. 87

³⁸ Ahmad Zahari, *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam: Hazairin dan KHI*, (Pontianak: Rameo Grafika, 2003), h. 25

³⁹ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), h. 19

⁴⁰ Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Gunung Agung, 1997), h. 207

⁴¹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Op. cit.*, h. 13

⁴² Bunyi dan maksud yang sama juga terdapat dalam Pasal 80 ayat (1) KHI. Sedangkan pada Pasal 80 ayat (4) KHI diuraikan tentang kewajiban suami memberi nafkah, *kiswah*, makan, biaya kebutuhan rumah tangga, pendidikan anak dan biaya kesehatan, sesuai dengan kemampuan suami. Bunyi dan Maksud yang sama juga terdapat dalam Pasal 80 ayat (1) KHI. Sedangkan pada Pasal 80 ayat (4) KHI diuraikan tentang kewajiban suami memberi nafkah, *kiswah*, makan, biaya kebutuhan rumah tangga, pendidikan anak dan biaya kesehatan, sesuai dengan kemampuan suami.

⁴³ Lihat Pasal 134 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 jo Pasal 83 ayat (2) KHI

⁴⁴ Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 1995), h. 119

⁴⁵ Nashruddin Baidan, *Tafsir bi al-Ra'yi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 65

⁴⁶ L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1990), h. 11-12

⁴⁷ Muhammad Amin summa, *Op. cit.*, h. 124

⁴⁸ Zainuddin Sardar, *Masa Depan Islam*, (Bandung: Pustaka, 1987), h. 203 dan 342

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid, Muhammad Mahyuddin. 1984. *Ahkam al-Mawaris fi Syari'ah al-Islamiyah 'ala Madzhab al-Imamah al-Arba'ah*, t. k.: Dar al-Kitab al-'Arabi.
- Apeldoorn, L. J. Van. 1990. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Baidan, Nashruddin. 1999. *Tafsir bi al-Ra'yi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Daud Ali, Muhammad, dkk. 1999. *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Ibn Katsir, 'Imaduddin Abi Fida Isma'il. 1418 H. *Tafsir al-Quran al-'Azhiim (Tafsir Ibn Katsir)*, Riyadh: Darussalam li an-Nasyr wa Tauzi'.
- Ibn Qayyim al-Jauziyah. tt. *I'lam al-Muwaq'in*, Beirut: Dar al-Fikr.
- al-Kahlani, Muhammad bin Ismail. tt. *Subulu al-Salam*, Bandung: Dahlan.
- al-Maraghi Ahmad Mushafa. tt. *Tafsir al-Maraghi*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Muhammad Syahrur. 1990. *al-Kitab wa al-Quran*, Damaskus: al-Ahali.
- Ridha, Muhammad Rasyid. tt. *Tafsir al-Quran al-Hakim, populer disebut Tafsir al-Manar*, Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Rofiq, Ahmad. 2004. *Fiqh Kontekstual: dari Normatif kepada Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ramulyo M. Idris. 1994. *Perbandingan pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut BW*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. t. t. *Ilmu Hukum Waris Menurut Ajaran Islam*, alih bahasa Husein al-Hamid, Surabaya: Mutiara Ilmu.
- as-Suyuthi Abu Fadhal, Abdurrahman bin Abi Bakar bin Muhammad. t. t. *Lubun Nuqul fi Asbab Nuzul*, Beirut: Dar al-Ihya' al-'Ulum.
- As-Sayis, Muhammad Ali. t. t. *Tafsir Ayat al-Ahkam*, al-Qahirah: t. p.
- Summa, Muhammad Amin. 2005. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syarifuddin, Amir. 1984. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: Gunung Agung.
- al-Thabari, Abu Ja'far, Muhammad bin Jarir. t. t. *Jami'ul Bayan*, Beirut: Dar al-Fikr
- Thalib, Sayuti. 1995. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafindo.
- Wadud, Amina Muhsin. 1992. *Quran and Woman*, Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti.